

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat sandar kapal, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional.

Perkembangan dan peningkatan ekonomi akan sangat tergantung pada peran dan fungsi pelabuhan, dan sudah barang tentu perkembangan perdagangan juga akan sangat tergantung pada kesiapan pelabuhan dalam mengantisipasi laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu variabel penting dalam peningkatan ekonomi adalah perdagangan itu sendiri termasuk perdangan jarak jauh maupun antar pulau dan hal ini membutuhkan sebuah pelabuhan yang memiliki fasilitas yang memadai termasuk dermaga dan gudang serta fasilitas lainnya.

Pelabuhan yang dalam bahasa Inggris disebut harbour bersinonim dengan kata port, namun demikian kedua konsep tersebut memiliki perbedaan. Harbour memiliki titik tekan pada konsep fisik yang memberikan pengertian pada pelabuhan sebagai tempat berlindung atau berteduhnya kapal-kapal, sedangkan port lebih mengacu pada konsep ekonomi yaitu pelabuhan sebagai tempat atau pusat tukar-menukar atau keluar-masuknya barang komoditas antara daerah hinterland dengan foreland. Dalam konsep fisik pelabuhan berarti dermaga tempat kapal-kapal berlabuh dengan segala fasilitasnya.

Mengingat betapa pentingnya dermaga sebagai tempat bersandarnya kapal dalam rangka melakukan kegiatan bongkar muat maka diperlukan pengelolaan yang baik sehingga kinerja bongkar muat di dermaga berjalan dengan lancar sebagai indikator kualitas pelayanan pelabuhan yang sempurna yang pada gilirannya kapal-kapal berbendera merah-putih maupun kapal-kapal berbendera asing berbondong-bondong melakukan kegiatannya di Pelabuhan Tanjung Priok.

Terlebih lagi saat ini kita telah memasuki era di mana pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dimulai, hal ini mengindikasikan bahwa persaingan ekonomi di tingkat regional semakin tajam dan ketat yang membutuhkan kecepatan dan kelancaran pelayanan bidang kepelabuhanan, karena kalau tidak mampu menunjukkan kinerja pelayanan bongkar muat di pelabuhan secara baik maka Pelabuhan Tanjung Priok akan ditinggalkan dan tidak akan disinggahi oleh kapal-kapal asing maupun domestik, mereka akan beralih ke pelabuhan-pelabuhan tetangga yang lebih mampu memberikan pelayanan bongkar muat secara cepat dan memberikan kemudahan bagi perdagangan.

Ketersediaan fasilitas pelabuhan yang memadai sangat diperlukan guna menunjang kelancaran kegiatan bongkar-muat di dermaga terlebih lagi menghadapi persaingan sebagaimana penulis sebutkan di atas suka atau tidak kita harus mengikuti arus perubahan global.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan besar di mana setiap hari rata-rata mampu menampung kunjungan kapal sampai dengan kurang lebih 90 (sembilan puluh) kapal, hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok dalam menunjang perdagangan baik ekspor maupun impor dan antar pulau, oleh karena itu fasilitas yang ada harus terus di-*upgrade* atau diperbaharui guna mengantisipasi peningkatan volume perdagangan yang semakin meningkat.

Fasilitas-fasilitas yang harus ada di Pelabuhan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok terdiri dari dermaga, gudang lini I, lapangan penumpukan lini I, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah (RF), fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya, dan beracun (B3) serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu

navigasi pelayaran (SBNP). Sedangkan fasilitas penunjang terdiri dari: kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya.

Mengingat keterbatasan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok maka pengembangan pelabuhan dialihkan ke Kali Baru atau new port of Tanjung Priok, guna mengantisipasi lonjakan perdagangan dan untuk menampung kapal-kapal yang memiliki draft yang besar, karena tidak mungkin Pelabuhan Tanjung Priok dikembangkan mengingat keterbatasan lahan.

Belum optimalnya peran dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dalam mengelola pelabuhan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 di mana peran Kantor Otoritas Pelabuhan adalah sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Untuk melakukan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab: 1) menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan, 2) menyediakan dan memelihara penahan gelombang kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, 3) menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, 4) menjaminn ketertiban dan keamanan pelabuhan, 5) menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan, 6) menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, 7) mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat peran dan tugas serta tanggungjawab Kantor Otoritas Pelabuhan yang begitu besar dalam mengelola pelabuhan maka diperlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mendukung terselenggaranya pelabuhan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2008,

sehingga pelabuhan Tanjung Priok dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya yang pada gilirannya peningkatan ekonomi dapat berjalan efektif dan efisien.

Masih tingginya *waiting time* di pelabuhan Tanjung Priok juga menjadi sebab pelabuhan ini kalah bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di tingkat Asia Tenggara seperti Port Klang, pelabuhan Singapura dan pelabuhan-pelabuhan negara tetangga lainnya.

Masalah lainnya yang mengakibatkan tingkat persaingan pelabuhan Tanjung Priok menjadi rendah adalah masih adanya monopoli pengelolaan oleh Badan Usaha Pelabuhan hal ini menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok kalah bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana penulis sebutkan di atas.



Gambar 1.1. Peta Pelabuhan Tanjung Priok

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana penulis sebutkan di atas maka dapat teridentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan wilayah pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Masih tingginya tingkat monopoli usaha oleh BUP.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi Otoritas Pelabuhan.

4. Tenaga bongkar muat yang telah memasuki masa pensiun.
5. Rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja bongkar muat.
6. Ketersediaan fasilitas pelabuhan yang belum memadai.
7. Kinerja pelabuhan yang belum optimal.
8. Kondisi alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang kapasitasnya masih sangat terbatas mengakibatkan oleh gerak kapal tidak leluasa, sehingga waktu tunggu kapal untuk masuk ke dermaga menjadi lebih lama mengakibatkan menurunnya kinerja bongkar muat di dermaga itu sendiri.
9. Adanya keterlambatan peremajaan tenaga kerja bongkar muat.
10. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bongkar muat di dermaga.
11. Kemacetan lalu-lintas di lingkungan pelabuhan mengakibatkan terhambatnya proses bongkar muat melalui truk karena truk yang telah terisi tetap tertahan di pelabuhan menunggu lalu-lintas cair sementara truk berikutnya telah menunggu untuk dimuati.

Sesuai dengan identifikasi di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Apakah terdapat hubungan antara ketersediaan fasilitas terhadap kinerja bongkar-muat barang di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok”.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana penulis sebutkan di atas maka tidak semuanya menjadi fokus perhatian penelitian, karena adanya berbagai kendala seperti keterbatasan waktu dan keterbatasan biaya, untuk itu penulis hanya akan meneliti mengenai keterkaitan antara ketersediaan fasilitas dan hubungannya dengan kinerja bongkar muat barang di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu:

1. Bagaimanakah kondisi fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok?
2. Apakah kinerja bongkar muat di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok telah sesuai dengan yang diharapkan?
3. Apakah ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan kinerja bongkar-muat di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok?.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi fasilitas pelabuhan Tanjung Priok.
2. Menganalisis kinerja bongkar-muat barang di dermaga pelabuhan Tanjung Priok.
3. Menganalisis keterkaitan ketersediaan fasilitas pelabuhan dengan kinerja bongkar-muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Manfaat penelitian:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperkaya dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen kepelabuhanan dalam mengelola pelabuhan sehingga pelabuhan khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya di lingkungan Asia Tenggara.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi batu loncatan untuk mengembangkan ilmu manajemen kepelabuhanan untuk kepentingan dunia akademis.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah ilmu dan wawasan bagi para petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelabuhan sesuai dengan tupoksinya yang pada gilirannya pelabuhan akan dapat berkembang sesuai yang diharapkan.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan di wilayah pelabuhan Tanjung Priok dalam mengelola pelabuhan yang efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab pembagian bab ini tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaatnya.

Bab II mengenai tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian pelabuhan, fasilitas, fasilitas pelabuhan, pengertian kinerja/*performance*, bongkar-muat barang di pelabuhan.

Bab III mengenai metodologi penelitian yang menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan teknik analisis data, serta bagan alur penelitian.

Bab IV mengenai hasil dan pembahasan yang menganalisis tentang sejarah singkat Pelabuhan Tanjung Priok, fakta dan data pelabuhan, gambaran umum responden, deskripsi variabel penelitian, dan ketersediaan fasilitas pelabuhan dalam menunjang kinerja bongkar-muat di dermaga.

Bab 5 mengenai penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penyampaian saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan.

